

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian kinerja, sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, diperlukan serangkaian proses manajemen kinerja yang dimulai dari merencanakan kinerja hingga mengevaluasi kinerja. Pemerintah daerah harus melakukan pengoptimalisasian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Dalam sistem manajemen strategi, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat penilai apakah strategi yang sudah ditetapkan telah berhasil dicapai. Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan *feedback* sehingga tercipta sistem pengukuran kinerja yang mampu memperbaiki kinerja organisasi secara berkelanjutan. Berdasarkan *feedback* (umpan balik) hasil pengukuran kinerja bisa memperbaiki kinerja pada periode berikutnya, baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi (Mahsun, 2009:145).

Lembaga sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi.

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada 3 elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik (Mulyadi, 2007). Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan tanggung jawab (akuntabilitas) yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. Pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk

dilihat apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Desentralisasi yang melahirkan kewenangan besar bagi pemerintah daerah mengelola sumber daya publik didaerahnya masing-masing. Upaya peningkatan daerah ini sering dilakukan dengan perluasan dan penjaringan para wajib pajak, penerimaan dari pajak dan retribusi ini merupakan pendapatan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Salah satu alat ukur menganalisis mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan menggunakan metode *value for money* yang memiliki kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik sekarang ini yang ekonomis, efisiensi, dan efektivitas atau yang dikenal dengan konsep 3E.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak dalam sektor publik dalam bidang jasa dan konstruksi, yang merupakan salah satu elemen penting bagi suatu daerah untuk menunjang perekonomian dan kehidupan masyarakat. Karena merupakan hal yang sangat penting maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami tekanan untuk lebih efisiensi dalam menyusun program kerja yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Kupang agar nantinya program kerjanya dapat menyentuh semua lapisan masyarakat.

Yang akan diteliti didalam penelitian ini laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kantor Dinas PUPR untuk melihat apakah pengelolaan dana publik telah efisien dan apakah semua program kerja yang telah disusun

dan dijalankan tepat sasaran atau tidak dan memiliki dampak jangka panjang atau tidak.

Dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang membuat rencana strategis (renstra) bersama Walikota Kupang yang kemudian menjadi rencana kerja (renja) selama 5 tahun dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dengan 7 sasaran dan 8 indikator beserta target dan realisasinya.

Tabel 1.1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kupang Tahun 2019-2021

NO	Sasaran	Indikator	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Terpenuhinya kebutuhan air baku bagi warga perkotaan dengan cakupan 100%	Jumlah ketersediaan air baku bagi warga perkotaan	2019	1.032.068.000	1.029.668.000
			2020	1.132.725.350	1.079.755.670
			2021	913.500.000	794.947.800
2	Berkembangnya sistem prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota	Jumlah jaringan jalan dalam kondisi baik	2019	3.130.640.000	2.993.424.000
			2020	501.811.880	496.721.880
			2021	27.875.859.360	26.774.365.490
3	Tersedianya pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Berkurangnya jumlah titik genangan tinggi dan durasi genangan	2019	2.589.650.000	924.654.100
			2020	2.768.567.980	2.383.726.386
			2021	942.200.000	942.092.000
4	Terkendalinya pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah penataan ruang terbuka hijau (RTH) sesuai dengan peruntukannya	2019	14.830.455.000	13.906.306.670
			2020	4.023.733.280	3.999.444.280
			2021	2.052.610.000	-
5	Pengurangan resiko bencana dan antisipasi perubahan iklim	Jumlah bangunan pengendali banjir	2019	2.015.500.000	1.991.944.620
			2020	313.938.350	310.587.350
			2021	200.194.150	200.194.150
6	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang layak	2019	-	-
			2020	1.491.486.800	1.476.486.800
			2021	-	-

		Jumlah gedung kantor yang direhab	2019	-	-
			2020	142.830.000	139.722.350
			2021	7.222.091.000	4.882.712.500
7	Pengelolaan air	Jumlah panjang jaringan irigasi	2019	2.925.200.000	2.777.403.660
			2020	1.438.225.000	1.421.847.000
			2021	306.174.120	306.174.120

Sumber Data : Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas PUPR

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa ada program kerja yang telah di anggarkan namun tidak dapat direalisasikan yaitu terkendalinya pemanfaatan ruang terbuka hijau dan program kerja yang tidak dianggarkan yaitu untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, tentu saja hal ini memiliki dampak yaitu dampak lingkungan, ruang terbuka hijau berfungsi untuk mengendalikan konsentrasi polutan udara, jika program ini tidak terealisasikan, kualitas udara bisa menurun dan berdampak bagi kesehatan masyarakat dan juga pengurangan kualitas hidup dikarenakan ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai tempat rekreasi dan olahraga. Dampak yang berikutnya ialah berpengaruh pada pelayanan publik, jika program untuk mewujudkan pelayanan publik tidak terealisasikan, ini bisa berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Mengacu pada penelitian terdahulu, Demi Aulia Arfan (2014) dengan judul penelitian “Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012”. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif pada pengukuran ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta telah menjalankan keseluruhan programnya dengan ekonomis, pada rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Daerah Istimewa

Yogyakarta masuk dalam kriteria efisien karena pada tahun 2011 hingga 2012 rata-rata tiga program kerja mendapat rasio lebih dari 100 %. Sedang pada pengukuran efektivitas Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 salah satu program yaitu program peningkatan kesejahteraan petani mendapat hasil sebesar 99,29 % dan masuk dalam kriteria kurang efektif, namun kedua programnya masuk dalam kategori efektif, sedangkan pada tahun 2012 ketiga program kerja masuk dalam kategori efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan prinsip value for money adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada kategori ekonomis, efisien, dan efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek yang diteliti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Demi Aulia Arfan (2014) yaitu objek penelitiannya, yaitu pada Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan dan program kerja menghasilkan suatu nilai manfaat bagi masyarakat atau tidak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Metode *Value For Money* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kupang jika

diukur dengan metode *value for money*?

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target dan dana yang tidak dianggarkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas PUPR menggunakan metode *value for money* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan capaian kinerja tidak tercapai dan tidak dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- (1). Dapat memberikan manfaat secara teoritis serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode *value for money* pada kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.
- (2). Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

(1). Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Agar dapat memberikan kontribusi serta masukan yang positif bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif, efisien, ekonomis dalam penyusunan program kerja.

(2). Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam mengukur kinerja sektor publik melalui pengetahuan peneliti yang diperoleh selama bangku kuliah.

(3). Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir.